PERTANAHAN

AKD: PERTANAHAN

Bulan: September 2023

Oleh: PERTANAHAN

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Pertanahan sebagai aset penting bagi sebuah negara mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Masalah pertanahan diberbagai pelosok daerah seperti adanya mafia tanah, sengketa tanah, dan aspek regulasi yang beririsan satu sama lain dapat berpengaruh yang besar bagi perekonomian, perlindungan lingkungan, keadilan sosial dan stabilitas sosial bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pertanahan di berbagai wilayah nusantara ini.

Kebijakan pemerintah diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat, sistem pertanahan yang transaparan dan pengaturan yang adil guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan itu dapat mencakup berbagai aspek diantaranya adalah :

- Penguatan Hak Kepemilikan Tanah. Dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat terutama bagi petani atau pemilik tanah kecil dan penyelesaian sengketa akan memberikan rasa aman dalam kepemilikan tanah mereka.
- Pengelolaan Pertanahan yang berkelanjutan.dengan pengelolaan pertanahan yang berprinsip pembangunan berkelanjutan diperlukan pengaturan yang ketat dalam penggunaan lahan, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.
- Transparansi dan Akses Informasi. Adanya kebijakan kemudahan mengakses informasi tentang kepemilikan tanah secara terbuka akan mengurangi prakti-praktik penpertanahanipuan dan pemalsuan dokumen
- Pemberdayaan Masyarakat. Adanya dukungan terhadap masyarakat terutama petani dalam hal pelatihan dan dukungan teknis guna memperdayakan masyarakat agar dapat mengelola tanah mereka dengan efisien dan peran aktif masyarakat diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait pertanahan.
- Investasi dan infrastruktur Pertanahan. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan seperti sistem pendaftaran tanah yang canggih pemerintah perlu berinvestrasi dalam infrastruktur pertanahan, sistem informasi geografis (SIG) dapat digunakan untuk pemetaan yang lebih akurat, dan teknologi blockchain dapat digunakan untuk mengamankan transaksi pertanahan.

Kebijakan pertanahan di Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanahan dan menekan ketidaksetaraan kepemilikan tanah, praktik korupsi juga sengketa pertanahan yang kompleks.

Dengan pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan transparansi, maka kebijakan ini akan menjadi instrumen yang efektif dalam mecapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua warga negara dalam hak kepemilikan tanah mereka.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Kurangi Konflik Pertanahan, Sertifikasi Gratis	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/3519
Berita	PERTANAHAN : Reforma Agraria Belum Berpihak kepada Petani	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/18362
Berita	PERTANAHAN : Reforma Agraria Belum Berpihak kepada Petani	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/18362
Berita	REFORMA AGRARIA : UUPA dan Transformasi Kebijakan Pertanahan	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/18359
Buku	Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan PPAT, kehutanan - lingkungan hidup & amdal tahun 2006	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=29 \n043&keywords=pertanahan
Buku	Hukum Administrasi Pertanahan	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=33 \n833&keywords=pertanahan
Buku	Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=15 \n097&keywords=pertanahan
Buku	Hukum agraria sengketa pertanahan: Penyelesaiannya melalui arbitrase dalam teori dan praktik	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=31 \n353&keywords=pertanahan
Buku	Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis: Hak Menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=27 \n514&keywords=pertanahan
Buku	Hukum lingkungan: dan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=30 \n788&keywords=pertanahan
Buku	Hukum Pertanahan Adat	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=32 \n529&keywords=pertanahan
Buku	Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=36 \n318&keywords=pertanahan
Buku	Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=26 \n258&keywords=pertanahan
Buku	Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=26 \n258&keywords=pertanahan
Buku	Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=24 \n199&keywords=pertanahan
Buku	Konflik Pertanahan	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=27 \n512&keywords=pertanahan
Buku	Peraturan - Peraturan tentang Perumahan & Pertanahan	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=33 \n689&keywords=pertanahan
Buku	Pertanahan (Agraria)	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=22 \n468&keywords=pertanahan
Buku	Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=31 \n554&keywords=pertanahan
Buku	Politik Hukum Pertanahan Indonesia	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=36 \n749&keywords=pertanahan
Buku	Sejarah hukum agraria	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=36 \n164&keywords=pertanahan
Buku	Sejarah hukum agraria	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=36 \n164&keywords=pertanahan

Buku	Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=36 \n297&keywords=pertanahan
Buku	tanya jawab masalah pertanahan	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=22 \n487&keywords=pertanahan
Undang-undang & Peraturan	Het Gemeentelijk Grondbedrijf	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=34 \n817&keywords=pertanahan
Undang-undang & Peraturan	Kitab undang-undang agraria dan pertanahan	https://opac.dpr.go.id/catalog \n/index.php?p=show_detail&id=27 \n528&keywords=pertanahan
Surat kabar	Agraria - Saat Penyelesaian Konflik Tak Sekadar Bagi-bagi Sertifikat	https://kliping.dpr.go.id/inde \nx/detail/id/43397
Surat kabar	Elemen masyarakat adukan kasus pertanahan ke panja mafia tanah	https://kliping.dpr.go.id/inde \nx/detail/id/44025
Surat kabar	Junimart: bisa jadi celah mafia tanah	https://kliping.dpr.go.id/inde \nx/detail/id/44762
Surat kabar	Optimalkan lahan kosong	https://kliping.dpr.go.id/inde \nx/detail/id/44831
Surat kabar	Pertanahan : Digitalisasi Arsip Pertanahan Mendesak	https://kliping.dpr.go.id/inde \nx/detail/id/43005